

Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0

Anas Anwar Nasirin

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran,
anwarnasirinanas@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahn Buruh Migran Indonesia (BMI) sebagai bagian dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada bidang informal di luar negeri perlu dicarikan solusi, khususnya yang bekerja di malaysia. Saat ini terdapat 283.640 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebanyak 47% bekerja di bidang formal dan 53% bekerja pada bidang informal, serta sebanyak 90.671 orang memilih bekerja di Malaysia. Sepanjang 2013 hingga 2017 terdapat 394 Buruh Migran Indonesia yang meninggal di Malaysia, kemudian pada 2019 sebanyak 104 Buruh Migran Indonesia diusir dari Malaysia ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan meneliti kondisi objek alamiah atas posisi peneliti sebagai instrumen kunci dalam mengkonstruktifkan pengalaman sosial partisipan, serta menggunakan model penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian membuktikan, penyebab permasalahan yang menimpa Buruh Migran Indonesia di Malaysia akibat redahnya kualifikasi dan belum ada lembaga sertifikasi profesi yang menjamin Kualifikasi Buruh Migran Indonesia yang diberangkatkan ke malaysia. Solusi terhadap permasalahan Buruh Migran Indonesia di Mlaysia adalah melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, sertifikasi kemampuan dan optimalisasi e-regulasi yang memayungi Buruh Migran Indonesia ke Malaysia. Melalui solusi ini diharapkan dapat meningkatkan standar kemampuan Buruh Migran Indonesia dari low-skilled menjadi semi-skilled bahkan skilled dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0.

Kata Kunci : Profesionalisasi, Buruh Migran Indonesia, Revolusi Industri 4.0

ABSTRACT

The Problems of Indonesian Migrant Workers (BMI) as part of Indonesian Migrant Workers (PMI) working in the informal sector abroad need to look for solutions, especially those working in Malaysia. At present there are 283,640 Indonesian Migrant Workers working abroad, as many as 47% work in the formal sector and 53% work in the informal sector, and as many as 90,671 people choose to work in Malaysia. During 2013 to 2017 there were 394 Indonesian Migrant Workers who died in Malaysia, then in 2019 104 Indonesian Migrant Workers were expelled from Malaysia to Indonesia. This study uses a qualitative method by examining the condition of natural objects on the position of researchers as a key instrument in constructing participants' social experiences, and using descriptive analytical research models. The research proves, the cause of the problems that befall Indonesian Migrant Workers in Malaysia is due to the lack of qualifications and there is no professional certification body that guarantees the Qualifications of Indonesian Migrant Workers dispatched to Malaysia. The solution to the problems of Indonesian Migrant Workers in Malaysia is through improving educational qualifications, certification of capabilities and optimizing e-regulations that cover Indonesian Migrant Workers to Malaysia. Through this solution, it is expected to be able to improve the

***Corresponding author**

Anas Anwar Nasirin
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Padjadjaran, anwarnasirinanas@gmail.com

Received: February 7, 2020

Revised: May 17, 2020

Accepted: June 5, 2020

Available Online: June 30, 2020

ability standards of Indonesian Migrant Workers from low-skilled to semi-skilled and even skilled in implementing the industrial revolution 4.0.

Keywords: Professionalization, Indonesian Migrant Workers, Industrial Revolution 4.0

Pendahuluan

Membahas tantangan dan peluang dalam bidang ketenagakerjaan sebagai bagian dari sumber daya manusia sektor publik di Indonesia adalah objek menarik. Secara peluang berdasarkan laporan McKinsey Global Institute (2012), perekonomian Indonesia saat ini berada pada urutan ke-16 terbesar di dunia dengan jumlah pekerja yang berkeahlian sebanyak 55 juta orang. Peluang tersebut menunjukkan perkembangan pesat, angka pengangguran di Indonesia menurun dari (11,2%) pada 2015 menjadi (5,3%) pada 2017. Kemudian, pada 2030 Indonesia diprediksi akan menjadi bagian tujuh kekuatan ekonomi dunia. Diperkirakan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia pada 2030 mencapai (64%) dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebanyak 297 juta jiwa atau dikenal dengan bonus demografi (Bappenas, 2017).

Data dari *International Labor Organization* (ILO) dalam Laporan Ketenagakerjaan Indonesia (2017), bahwa tantangan perkembangan ekonomi di Indonesia khususnya dalam penyediaan lapangan kerja masih terjadi kesenjangan terkait produktivitas, kualitas kerja, gender dan disparitas yang terjadi antar provinsi. Banyak pekerja yang melakukan pekerjaan dengan produktivitas rendah, dibuktikan dengan tingginya proporsi pekerja yang melakukan pekerjaan rentan (30,6%). Kemudian, jika ditambahkan dengan jumlah pekerja tidak tetap serta pekerja lepasan maka proporsi pekerja yang melakukan pekerjaan rentan meningkat menjadi (57,6%), bahkan presentase ini lebih tinggi lagi dikalangan pekerja perempuan (61,8%).

Saat ini di Indonesia memasuki era *internet-of-things* yang mengkombinasikan sistem kerja mesin dengan tenaga manusia atau dikenal dengan revolusi industri 4.0. Era ini sudah terpolarisasi dalam arus produksi, distribusi dan konsumsi. Kondisi ini dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terhubung ke ruang digital melalui gawai yang mereka miliki dan pergunakan sehari-hari. Pada kenyataannya sistem kerja Revolusi Industri 4.0 disamping mendorong terciptanya inovasi dan pertumbuhan kerja dengan produktivitas tinggi juga menciptakan acaman bagi para pekerja rentan, seperti banyaknya para penjaga toko yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena proses jual beli yang sudah banyak beralih ke sistem *e-dagang*.

Akibat pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga manusia (padat karya) di Indonesia berkurang, mendorong para pekerja rentan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup

dengan menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI) ke luar negeri. UU No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 1 bahwa, "*Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia*". Dalam hal ini BMI merupakan bagian dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk dalam katagori pekerja informal seperti Pembantu Rumah Tangga (PRT), buruh konstruksi bangunan, buruh perkebunan, buruh pabrik dan *cleaning service*.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, pada 2018 PMI yang ditempatkan di luar negeri mencapai 283.640 pekerja. Sebanyak 47% PMI bekerja di bidang formal dan 53% lagi bekerja pada bidang informal, kemudian sebanyak 90.671 PMI memilih bekerja di Malaysia (BNP2TKI, 2019). Pada 2018 Bank Indonesia (BI) mencatat, jumlah remitasi (pengiriman uang antar negara) dari PMI yang bekerja di luar negeri mencapai US\$ 10,8 miliar atau sekitar Rp 151 triliun (asumsi kurs Rp 14 ribu per dolar) dari jumlah PMI di luar negeri sebanyak 3,65 juta orang. Ditinjau dari negara asal remitasi, PMI yang bekerja di kawasan Asia Pasifik menjadi penyumbang remitasi terbesar hampir (70%) dari total remitasi, khususnya Malaysia menyumbang remitasi mencapai lebih dari (40%) (CNN Indonesia/ Wicaksono, 2019).

Besarnya kontribusi BMI yang bekerja di Malaysia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diiringi dengan sejumlah masalah yang menimpa BMI di Malaysia. Dikutip dari Britagar.id (2018), Malaysia menjadi negara tempat kematian BMI terbanyak sepanjang 2013-2017 terdapat 394 BMI yang meninggal. Pada 17 Februari 2017 Adelina Sau, BMI asal Timor Tengah Selatan dipulangkan ke kampung halamannya dalam kondisi tidak bernyawa akibat dianiaya majikannya di Malaysia. Kemudian, pada 2019 terjadi pengusiran terhadap 104 BMI dari Sabah, Malaysia ke Kabupaten Nunukan, Indonesia. Pengusiran terjadi karena dilatarbelakangi tidak lengkapnya administrasi para BMI hingga kriminalitas (Detik News, 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui penyebab permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia dan solusi untuk menyelesaikannya, dirumuskan melalui pertanyaan berikut: (1) Apakah penyebab permasalahan yang menimpa Buruh Migran Indonesia di Malaysia? (2) Haruskah pemerintah Indonesia mempertahankan izin penempatan Buruh Migran Indonesia ke Malaysia? (3) Bagaimanakah upaya menyelesaikan permasalahan Buruh

Migran Indonesia di Malaysia dan profesionalisasi profesi buruh migran dalam memanfaatkan revolusi industri 4.0?

TINJAUAN PUSTAKA

Profesionalisasi

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily dalam Sangkot Sirait (2013), secara etimologis kata profesi berasal dari kata *profession* yang memiliki arti pekerjaan. Istilah *professional* memiliki arti “*orang yang ahli*” atau “*tenaga ahli*”. Kemudian, istilah profesionalisasi merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 ayat 4, dapat diinterpretasikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan individu atau lembaga yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan untuk memenuhi standar mutu dan norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi.

Kaitannya dengan profesionalisasi profesi BMI, BMI profesional dapat dibedakan dari buruh migran biasa walaupun sama-sama menguasai sejumlah teknik dan prosedur kerja. Seorang BMI profesional memiliki kode etik profesi dan filosofi dalam setiap menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.

Buruh Migran Indonesia

Pengertian BMI dalam perkembangannya sangat erat dengan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 ayat 1, bahwa Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dalam perjalanan waktu istilah TKI disempurnakan lagi dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat 2, bahwa PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan terbaru UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian, hingga saat ini pemerintah belum memberikan definisi BMI secara khusus dan jelas dalam Undang-undang. Pada konteks ini BMI dapat diartikan sebagai bagian dari PMI yang termasuk dalam kategori pekerja informal yang mayoritas bekerja sebagai buruh seperti Pembantu Rumah Tangga (PRT), buruh konstruksi bangunan, buruh perkebunan, buruh pabrik dan *cleaning service*.

Banyaknya BMI yang bermigrasi untuk bekerja di luar negeri karena masyarakat Indonesia memiliki budaya migrasi yang tinggi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan niatan untuk menetap atau mencari penghidupan yang lebih baik di daerah tujuan. Terjadinya migrasi BMI ke daerah baru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Teori Kebutuhan dan Tekanan (*Need and stress*). Bahwa, tiap-tiap individu memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Baik kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketika kebutuhan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka terjadilah tekanan atau stres yang memutuskan melakukan migrasi (Mantra dalam Mahzuni, 2007).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan LPPKN (Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara) tahun 2010 di Tawau, Malaysia. Diketahui faktor yang mendorong BMI Memilih bekerja di Malaysia khususnya adalah untuk mencari pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian, faktor migrasi disamping faktor ekonomi, seperti geografi yang strategis, kehadiran keluarga, *saudara mara* (kerabat), persamaan agama juga budaya. Faktor utama yang mendorong migrasi BMI ke Malayasia karena tekanan atas kondisi pengangguran yang tinggi di Indonesia dan peluang kerja yang terbuka lebar di Malaysia.

Revolusi Industri 4.0

Dinamisasi zaman saat ini sudah memasuki revolusi industri 4.0 dengan sistem produksi smart factories hingga advanced manufacturing. Istilah revolusi industri 4.0 pertama kali di perkenalkan di Jerman pada perhelatan Hannover Fair tahun 2011. Dikatakan Revolusi Industri 4.0 sebagai kelanjutan dari tiga revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri 3.0 terjadi pada 1990-an yang ditandai dengan dilibatkannya robot untuk bekerja bersama manusia, bahkan menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Pada awal abad XX terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai digantinya tenaga mesin uap oleh mesin listrik dan munculnya mobil sebagai sarana yang mempermudah pendistribusian barang. Revolusi industri pertama terjadi pada 1776, ketika James Watt berhasil menciptakan mesin uap dan mulai digantikannya tenaga manusia oleh mesin uap. (Zenius, 2019).

Malaysia

Malaysia merupakan negara berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang yang dipertuan agung sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintah adalah perdana menteri. Malaysia menggunakan sistem pemerintahan federasi yang dibagi kedalam 13 negara bagian serta 3 persekutuan.

Studi kasus profesionalisasi BMI dilakukan terhadap BMI yang bekerja di Malaysia. Saat ini di Malaysia terdapat 90.671 orang PMI. Letak geografis Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia, khususnya wilayah Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan dengan luas $\pm 332.370 \text{ KM}^2$. Kemudian, bahasa nasional Malaysia adalah bahasa Melayu yang dialiknya hampir sama dengan bahasa Melayu warga Indonesia seperti di Aceh dan Padang ((BNP2TKI & IOM, 2014).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap interaksi dan situasi sosial setiap individu (Danim, 2002). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, arti penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci untuk mengkonstruktifkan pengalaman sosial setiap partisipan (Sugiyono dalam Nasirin, 2018).

Model penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis karena untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi saat ini. Melalui pendekatan model penelitian deskriptif analitis akan diperoleh gambaran secara nyata yang menjadi penyebab permasalahan BMI di Malaysia dan solusi untuk mengatasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Permasalahan yang Menimpa Buruh Migran Indonesia di Malaysia

Buruh Migran Indonesia sebagai bagian dari Pekerja Migran Indonesia merupakan tenaga kerja Indonesia. Menurut UU No.13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2, tenaga kerja adalah, *“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”* (Disnakertrans Jawa Barat, 2014). Dalam hal ini, negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan kepada penduduk yang sudah memasuki usia kerja sebagaimana termuat dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, *“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”*.

Tetapi, saat negara sudah menyiapkan lapangan pekerjaan seringkali bertolak belakang dengan kemampuan masyarakat karena belum memenuhi kualifikasi kerja yang ditetapkan. Misalnya, pada proyek Pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta memperkerjakan 6.600 pekerja dari Tiongkok (CNBC Indonesia, 2018). Kondisi tersebut sempat menjadi topik perbincangan karena penduduk Indonesia sendiri masih banyak yang nganggur, malah

mendatangkan para pekerja dari Tiongkok. Ternyata sikap tersebut diambil karena ada beberapa bidang pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh orang Indonesia.

Kondisi para pekerja rentan yang berkualifikasi rendah, kemudian dihadapkan dengan persaingan kerja yang ketat sebagai pengaruh dari Revolusi Industri 4.0 menjadikan posisi mereka di Indonesia semakin terpinggirkan. Kondisi tersebut mendorong sebagian dari mereka memilih menjadi BMI ke Malaysia. Menjadi BMI di Malaysia yang mayoritas bekerja pada bidang pekerjaan 3D: *dirty* (kotor), *difficult* (sulit), dan *dangerous* (berbahaya) seperti Pembantu Rumah Tangga (PRT), buruh konstruksi bangunan, buruh perkebunan, buruh pabrik/kilang, dan *cleaning service* dianggap tidak memerlukan keahlian khusus, setandar pendidikan tertentu, dan upah yang diterima jauh lebih besar dibanding saat bekerja di Indonesia.

Disisi lain banyaknya orang Indonesia yang menjadi BMI di Malaysia dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan memberikan keuntungan bagi negara berupa pemasukan devisa. Hingga, beberapa BMI mampu meningkatkan status sosial ekonomi di daerah masing-masing pasca kepulangannya dari Malaysia. Ternyata, dibalik besarnya keuntungan yang dihasilkan para BMI dan pemasukan devisa terhadap kas negara juga diikuti oleh sejumlah permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia.

Sepanjang 2013 hingga 2017 terdapat 394 BMI yang meninggal di Malaysia. Pada 2015 iklan perusahaan Robovac, sebuah perusahaan penjual robot pembersih rumah dalam *banner*-nya menuliskan, "*Leading Robovac Specialist, fire your Indonesian Maid, NOW!*". Kalimat ini bernada merendahkan para BMI, agar masyarakat Malaysia memecat pembantu yang berasal dari Indonesia dan menggantikannya dengan produk robot pembersih rumah buatan Robovac. Pada 2019 terjadi pengusiran terhadap 104 BMI dari Sabah, Malaysia ke Kabupaten Nunukan yang dilatarbelakangi tidak lengkapnya administrasi para BMI hingga kriminalitas (Detik News, 2019).

Menurut Nazarudin Zainun (2007), penyebab terjadinya banyak masalah yang menimpa para BMI di Malaysia karena miskomunikasi, akibat banyak BMI tahap pendidikannya rendah, berasal dari kampung yang mundur dan miskin sehingga seringkali tidak dapat memahami suatu arahan majikan dengan cepat dan tepat. Pernyataan Zainun menyiratkan, bahwa penyebab permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia disamping rendahnya kualifikasi BMI juga akibat belum adanya standar profesi yang menjamin dan memberikan pengakuan atas kemampuan BMI yang diberangkatkan ke Malaysia.

Kemudian, kondisi di Malaysia saat ini satu tahap lebih maju dari Indonesia dalam mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0. Kondisi tersebut akan menyulitkan bagi para BMI khususnya yang berasal dari desa dan berpendidikan rendah, jika tidak adanya profesionalisasi profesi terhadap BMI.

Kemajuan Malaysia mengimplementasikan teknologi dalam sistem kerja dan pembangunan ekonomi sudah dimulai sejak 2002 berdasar pidato Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Fong Chan Onn, “*Malaysia aspires to be completely independent of foreign workers but the hard reality is that the process of transition from a labour intensive economy to a tech-intensive economy, we need a period of adjustment*” (Migration News, 2002).

Mempertahankan Izin Penempatan Buruh Migran Indonesia ke Malaysia

Sejarah peraturan pengiriman BMI ke Malaysia secara resmi dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 408/Men/1984 Tentang Pengerahan Tenaga Kerja ke Malaysia, dan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 12 Mei 1984 yang dikenal sebagai *Medan Agreement* (Wahyu Susilo, 2013).

Banyaknya permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia mendorong sebagian masyarakat bersuara, agar izin pengiriman BMI ke Malaysia diberhentikan sementara atau dimoratorium. Pelaksanaan moratorium pernah ditempuh oleh pemerintah Indonesia terhadap Malaysia pada 25 Juni 2009. Tapi, pasca dilaksanakannya Moratorium sejak 25 Juni 2009 menyebabkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan pada 2010 total remitasi dari luar negeri menurun drastis hanya US\$ 6 miliar.

Para ahli seperti Eni Sri Hartati dari *Institute for Development of Economic and Finance* berpendapat, bahwa kebijakan moratorium ke Malaysia akan merugikan kedua negara, walaupun Indonesia saat ini memiliki *bargaining position* lebih tinggi dibanding Malaysia tetapi di Indonesia masih memiliki permasalahan pengangguran yang belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Pendapat serupa juga disampaikan Wahyu Susilo dari *Migrant Care*, kebijakan moratorium ditakutkan memicu tingginya gelombang pengiriman BMI tanpa dokumen seperti yang terjadi pada 11.000 orang yang masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal pasca diberlakukannya moratorium pengiriman BMI ke Malaysia pada 2009 (Renaldi, 2018).

Solusi menyelesaikan permasalahan yang menimpa BMI di Malaysia melalui moratorium untuk saat ini bukan pilihan tepat. Solusi tersebut dapat ditempuh dengan membentuk *Join*

working grup berupa diskusi yang melibatkan kedua negara duduk bersama dan menyampaikan keluhan soal tata kelola pekerja migran, sembari merumuskan solusi. Upaya semacam ini pernah ditempuh oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 12 Mei 1984 yang menghasilkan *Medan Agreement* bertujuan untuk memonitor migrasi Pekerja Migran Indonesia dari Indonesia ke Malaysia.

Upaya Menyelesaikan Permasalahan BMI di Malaysia dan Profesionalisasi Profesi Buruh Migran Dalam Mengimplementasikan Revolusi Industri 4.0

Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi BMI baik melalui pendidikan maupun pelatihan guna menjadi profesi buruh migran berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maupun ILO sebagai induk organisasi perburuhan internasional. Schein dalam (Kusnanto, 2004) mengingatkan, suatu pekerjaan dapat dikatakan profesi manakala memiliki pengakuan khusus terkait kemampuan dan keahlian dari lembaga kompeten, mengabdikan pada kepentingan masyarakat sesuai kode etik profesi, dan menjadi anggota suatu organisasi profesi.

Menyikapi sebanyak 90.671 PMI yang bekerja di Malaysia yang sebagian besar bekerja sebagai BMI. Kemudian, kondisi zaman yang sudah membawa dinamisasi pada Revolusi Industri 4.0. Upaya menyelesaikan permasalahan BMI di Malaysia dan profesionalisasi profesi BMI dapat ditempuh melalui peningkatan kualifikasi pendidikan, sertifikasi kemampuan dari tempat pelatihan dan optimalisasi *e-regulasi* yang memayungi BMI ke Malaysia.

a. Kualifikasi Pendidikan

Melalui kualifikasi pendidikan yang sebelumnya syarat menjadi BMI minimal lulusan SD (Sekolah Dasar) perlu ditingkatkan menjadi lulusan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama). Tujuannya, agar setiap BMI yang bekerja di Malaysia secara psikis mereka lebih matang dan juga sudah menguasai pengetahuan dasar (membaca dan menulis).

b. Sertifikasi Kemampuan

Sertifikasi kemampuan merupakan pengakuan bahwa calon BMI bersangkutan sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Sertifikasi dapat diberikan oleh BLK (Balai Latihan Kerja) dan sejenisnya yang sudah menjalin kerjasama dengan BNP2TKI. Sertifikasi diutamakan pada kemampuan mengerjakan bidang pekerjaan yang akan dikerjakan di Malaysia. Seperti, kemampuan memasak makanan utama masyarakat Malaysia. Kemampuan ini perlu dikuasai

karena makanan utama masyarakat Malaysia tentunya berbeda dengan makanan utama seorang BMI, misalnya seorang BMI yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat.

Selanjutnya, sertifikasi kemampuan bahasa Melayu atau bahasa Inggris, kemampuan literasi (membaca dan menulis) dan kemampuan menggunakan Smart Phone. Fungsi sertifikasi tersebut salah satunya untuk menjaga keselamatan jiwa BMI di Malaysia. Setiap BMI selain bekerja juga harus mampu memahami peraturan di sana yang sebagian besar menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Saat ini sudah memasuki era digital, sebagian peraturan di Malaysia sudah e-regulasi sehingga kemampuan BMI menggunakan Smart phone dapat menjadi salah satu indikator keselamatan jiwa dan sarana untuk berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia.

c. Optimalisasi E-regulasi BMI ke Malaysia

Program asuransi jaminan kesehatan yang sudah berjalan bagi BMI di Singapura melalui aplikasi BPJSTKU dibawah kendali BPJS Ketenagakerjaan. Program ini perlu diadopsi terhadap para BMI yang bekerja di Malaysia. Program ini dapat dilakukan dengan sistem reimburse (BPJS menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi di Malaysia) dan program ini bisa diakses secara online.

Fungsi standar aplikasi online Sipmi (Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia) yang diluncurkan oleh Kemenaker pada 2018 perlu ditingkatkan, selain menyediakan informasi regulasi, tata cara dan proses migrasi ke luar negeri serta keadaan negara tujuan. Aplikasi Sipmi juga harus mampu mengadvokasi BMI terutama pada tahap prapemberangkatan dengan menyajikan informasi yang tepat dan akurat untuk menekan para calo dan BMI non-prosudural (ilegal).

KESIMPULAN

Permasalahan Buruh Migran Indonesi sebagai bagian dari Pekerja Migran Indonesia jarang mendapatkan sorotan dibandingkan dengan kontribusi yang sudah diberikan kepada negara. Fakta pada 2018 terdapat 283.640 Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan 90.671 orang diantaranya bekerja di Malaysia. Memberikan bukti bahwa Penempatan BMI ke Malaysia untuk saat ini tidak mungkin dapat dimoratorium, mengingat pengalaman dari moratorium ke Malaysia pada 2009. Sampai saat ini izin penempatan BMI ke Malaysia masih efektif untuk dipertahankan.

Tapi, pengiriman BMI ke Malaysia dipertahankan saja tidak cukup. Dalam merespon dinamisasi jaman yang sudah memasuki Revolusi Industri 4.0. Profesionalisasi BMI khususnya

yang bekerja ke Malaysia dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang menimpa BMI saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian, upaya profesionalisasi BMI juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan standar kemapun BMI dari *low-skilled* menjadi *semi-skilled* bahkan menjadi *skilled* dalam mengimplementasikan revolusi industri 4.0

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul. (2018, Desember 20). Ribuan Pekerja China Garap Kreta Cepat Jakarta-Bandung. CNBC Indonesia. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220124657-4-47274/ribuan-pekerja-china-garap-kereta-cepat-jakarta-bandung>
- BNP2TKI. (2019, April 04). Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para Tenaga Kerja Indonesia. Dkatada. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan-utama-para-tenaga-kerja-indonesia>
- Counter Trafficking and Labour Migration, IOM Indonesia. 2014. “Budaya dan Adat Istiadat Negara Tujuan Penempatan”. Jakarta: IOM Indonesia
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. 2014. Laporan Kajian Pekerja Indonesia di Bahagian Tawau, Sabah. Kuala Lumpur: Bahagian Kependudukan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN).
- Kepala Biro Humas dan Tata Usaha. 2017. Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan. Jakarta:Kementrian PPN/Bappenas
- Kusnanto. 2004. Pengantar dan Profesi Keperawatan Profesional. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017: Memanfaatkan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Penciptaan Lapangan Kerja. Jakarta: International Labour Organization
- Migration News. September 2002, Volume 9, Nomor 9. Malaysia/Indonesia. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui <https://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=2802>
- Mahzuni, Dade. 2007. Migrasi Bugis dan Adaptasi Sosial. Bekasi: Kipas (Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial).
- Nasirin. A., & Ampera. “Wheel of Hope as Media Creates Hope Become Reality and Becomes a Parameter Success in Realizing Dreams: A Case Study at Darul

Inayah Cisarua Orphanage Bandung” International Journal of Culture and History, Vol. 4, No. 4, December 2018

Nazrudin, Z. (2007). Pensyarah Sejarah asia Tenggara (Indonesia). Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan. Malaysia: Universiti Sains Malaysia, Pulau Penang.

Oberman, Raoul, dkk. 2012. The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential. Jakarta: McKinsey Global Institute

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Sekretariat Negara. Jakarta

Rochmim, Nur, Muhammad. (2018, Februari 23). Malaysia Negara Paling Bermasalah dengan TKI. Britagar.id. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui <https://beritagar.id/artikel/berita/malaysia-negara-paling-bermasalah-dengan-tki>

Renaldi, Adi. (2018, Februari 21). Moratorium Bagus Jargon, Tapi Bukan Solusi Masalah TKI di Malaysia. Vice. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui https://www.vice.com/id_id/article/437qqd/moratorium-bagus-sebagai-jargon-tapi-bukan-solusi-masalah-tki-di-malaysia

Sirait, Sangko. Profesionalitas Guru MI Program Dual Mode System Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunankalijaga Yogyakarta Dalam Pembelajaran Aqidah. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. X, No.1, Juni 2013.

Saputra, Ari. (2019, Januari 22). 104 TKI di Malaysia Diusir ke Nunukan. Detik News. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui <https://news.detik.com/berita/d-4395620/104-tki-di-malaysia-diusir-ke-nunukan>

Susilo, Wahyu dkk. 2013. Selusur Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia. Jakarta: Migrant CARE.

Susanto, Marcel. (2019, Januari 18). Apa Itu Revolusi industri 4.0?. Zenius.net. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui <https://www.zenius.net/blog/21104/revolusi-industri-4-0>

Wicaksono, Adhi. (2019, Februari 11). Tahun Lalu, Pengiriman Uang TKI Capai US\$ 10,8 Miliar. CNN Indonesia. Dikases pada 13 Juli 2019 melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211102744-78-368033/tahun-lalu-pengiriman-uang-tki-capai-us-108-miliar>

Widiatmoko, Hening. 2014. Panduan Serapan 2 (Dua) Juta Kesempatan Kerja (Tenaga Kerja). Bandung: Disnakertrans Jawa Barat.